



# Risalah Kebijakan

Nomor 30, November 2021

## Praktik Menjanjikan **Penerapan Kurikulum Prototipe** pada Program Sekolah Penggerak

### Ringkasan

- Krisis pembelajaran yang terjadi di Indonesia yang diperparah oleh pandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Bertolak dari keberhasilan penerapan kurikulum darurat dalam mengurangi potensi *learning loss* siswa, intervensi kurikulum menjadi salah satu aspek penting dalam upaya tersebut.
- Implementasi kurikulum prototipe secara terbatas pada 2.500 satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) secara umum menunjukkan hasil yang positif. Adaptasi kurikulum prototipe telah mendorong satuan pendidikan menyusun perencanaan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, serta melaksanakan pembelajaran yang lebih beragam dan terdiferensiasi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa.
- Kurikulum prototipe tidak hanya mengubah struktur kurikulum, tetapi juga menawarkan perubahan *mindset* kepala sekolah, guru, dan ekosistem pendidikan secara luas. Untuk itu, dibutuhkan upaya penguatan berbagai aspek melalui pelatihan, pendampingan, dan diseminasi melalui beragam bentuk dan media selama proses adaptasi berlangsung. Penguatan dukungan daerah juga perlu didorong dalam mengoptimalkan implementasi kurikulum prototipe di satuan pendidikan.



## Konteks

Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan menjadi tantangan utama pembangunan pendidikan di Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir. Untuk mengatasi tantangan ini, sejak 2009 pemerintah telah memenuhi mandat anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, serta terus meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 332,4 T pada 2013, menjadi Rp 550 T pada 2021 (Kemenkeu.go.id, 2021). Upaya tersebut telah berkontribusi positif pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesejahteraan guru, penurunan ukuran kelas (rasio guru-siswa), serta perbaikan sarana dan prasarana di satuan pendidikan (Beatty et.al, 2021; Muttaqin, 2018).

Namun demikian, berbagai indikator capaian belajar siswa belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Hasil PISA 2018 masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah negara-negara OECD. Kesenjangan kualitas pendidikan berdasarkan wilayah maupun kondisi sosial ekonomi siswa masih membayangi potret pendidikan di Indonesia. Analisis mengungkapkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan salah satunya karena kurikulum yang terlalu padat sehingga membebani siswa. Pritchett dan Beatty (2012) menyatakan bahwa materi kurikulum yang terlalu sulit bagi siswa menjadi salah satu sebab ketertinggalan kualitas pendidikan di negara berkembang, sementara guru hanya berfokus pada upaya mengejar ketuntasan kurikulum.

Rendahnya kualitas pendidikan juga diperburuk oleh pandemi COVID-19. Berbagai studi memperlihatkan, kesulitan satuan pendidikan beradaptasi dalam pembelajaran di masa pandemi karena akses terhadap jaringan internet, perangkat, maupun kapasitas SDM, mendorong terjadinya kehilangan pembelajaran (*learning loss*) & memperlebar kesenjangan pendidikan (SMERU-The RISE Programme in Indonesia, 2020; Puslitjak dan INOVASI, 2021). Krisis pembelajaran ini perlu segera ditangani karena jika tidak akan menyebabkan fenomena *schooling ain't learning* - bersekolah tetapi tidak mendapatkan pembelajaran (Pritchett, 2012).

Penanganan krisis pembelajaran di Indonesia membutuhkan upaya penanganan yang holistik dan terintegrasi. Sebagai salah satu upaya tersebut, khususnya dalam menangani beban kurikulum yang terlalu padat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah mengembangkan kurikulum prototipe. Pengembangan kurikulum ini diawali dari penerapan kurikulum darurat di masa pandemi, yaitu melalui penyederhanaan kurikulum yang mengarahkan siswa untuk fokus pada kompetensi esensial. Hasil evaluasi menunjukkan penggunaan kurikulum darurat mampu mengurangi indikasi *learning loss* secara signifikan selama pandemi, baik untuk capaian literasi maupun numerasi (Puslitjak & INOVASI, 2021). Pada pengembangan berikutnya, kurikulum prototipe juga berfokus pada pencapaian pembelajaran kontekstual yang menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan siswa. Saat ini, kurikulum ini telah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak yang tersebar di 111 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia.

## Prinsip-prinsip Kurikulum Prototipe pada Sekolah Penggerak

Kurikulum prototipe menawarkan fokus pada kompetensi materi yang lebih esensial. Kajian menunjukkan, penurunan kualitas pendidikan di banyak negara sering kali disebabkan oleh materi yang terlalu padat (OECD, 2020). Akibatnya, guru hanya cenderung berfokus pada ketercapaian materi kurikulum, tanpa memperhitungkan kemampuan siswa untuk memahami pelajaran tersebut. Oleh karena itu, penyederhanaan konten perlu dilakukan agar pembelajaran dapat lebih mendalam (*deep learning*) dan lebih bermakna (*meaningful learning*).

Kesenjangan antarwilayah maupun antarsiswa di tingkat satuan pendidikan, juga mendorong dibutuhkan pembelajaran kontekstual berlandaskan *differentiated learning*. Pembelajaran model ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi yang mampu menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam konsep pembelajaran paradigma baru, kurikulum operasional satuan pendidikan, pembelajaran, dan asesmen merupakan komponen yang saling berkaitan dan membentuk sebuah siklus. Aktivitas pembelajaran akan dinilai melalui asesmen, yang kemudian akan memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran pada siklus berikutnya sebagai bagian dari bentuk refleksi guru dan siswa. Dengan pendekatan asesmen, kurikulum prototipe akan menghasilkan pembelajaran kontekstual dan bukan pendekatan *one-size-fits-all*, sehingga pembelajaran memungkinkan untuk disesuaikan dengan konteks budaya lokal, latar belakang siswa, serta kebutuhan belajar individu.

Salah satu ciri khas struktur kurikulum prototipe yang fokus pada konteks kelokalan, fleksibilitas, dan pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran berbasis proyek melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam menjawab tantangan zaman melalui berbagai aksi nyata. Pendekatan pembelajaran ini tidak saja memberikan kesempatan peserta didik untuk mengasah berbagai kompetensi umum dan karakter, tetapi juga untuk membangun kepedulian dan kepekaan pada lingkungan sekitarnya. Pembelajaran ini juga memberikan peluang terbangunnya pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual sesuai tahap perkembangan siswa. Oleh karena itu, P5 sangat penting untuk dilakukan pada setiap jenjang pendidikan.

Pada kurikulum prototipe, terdapat karakteristik pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Pada jenjang PAUD, struktur kurikulum lebih menekankan pada proses bermain dan belajar berbasis literasi. Proses ini dilakukan untuk menghindari metode pembelajaran *drilling* pada siswa PAUD. Sebaliknya, guru atau pendidik PAUD menstimulasi kegemaran anak untuk membaca melalui berbagai kegiatan menyenangkan yang dapat mengembangkan kemampuan literasi dasar siswa (*play-based pedagogy*). Agar transisi antara PAUD dan SD tidak timpang, struktur kurikulum pada jenjang SD juga menekankan pada dasar-dasar literasi. Penguatan literasi sudah tidak berfokus pada pembelajaran bermain, tetapi diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, seperti Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS). Pada jenjang SMP, mata pelajaran Informatika menjadi mata pelajaran wajib. Keputusan ini dilandasi oleh pentingnya penguatan kemampuan berpikir komputasional (*computational thinking*).

Selain itu, pada struktur kurikulum SMA, penekanan lebih diutamakan pada minat dan bakat untuk mempersiapkan diri pada tahap berikutnya. Pada jenjang SMA, mekanisme *tracking system* yaitu peminatan berdasarkan rumpun IPA, IPS, atau Bahasa diubah menjadi peminatan berdasarkan mata pelajaran. Artinya, pada kurikulum prototipe, siswa memiliki kesempatan untuk menentukan mata pelajaran yang akan dipilihnya sesuai dengan minat, bakat, serta aspirasi yang berasal dari lintas rumpun ilmu.

**Tabel 1** Ringkasan Kekhasan Kurikulum Prototipe pada Tiap Jenjang Pendidikan

PAUD	SD	SMP	SMA	SLB
<p>Kegiatan <b>bermain</b> sebagai proses belajar yang utama</p> <p>Penguatan <b>literasi dini</b> dan penanaman karakter melalui kegiatan <b>bermain-belajar</b> berbasis buku bacaan anak</p> <p><b>Fase Fondasi</b> untuk meningkatkan kesiapan bersekolah</p> <p><b>Pembelajaran berbasis proyek</b> untuk penguatan profil Pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan <b>perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal</b></p>	<p>Penguatan kompetensi yang mendasar dan <b>pemahaman holistik</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran <b>IPA dan IPS digabungkan</b> sebagai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS)</li> <li>Integrasi <b>computational thinking</b> dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS</li> </ul> <p><b>Pembelajaran berbasis proyek</b> untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila dilakukan <b>2 kali</b> dalam satu tahun ajaran</p>	<p>Penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran <b>informatika</b> menjadi mata pelajaran wajib</p> <p><b>Panduan</b> untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran <b>tidak harus</b> berlatar belakang pendidikan informatika</p> <p><b>Pembelajaran berbasis proyek</b> untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila dilakukan <b>3 kali</b> dalam satu tahun ajaran</p>	<p>Program peminatan/ penjurusan <b>tidak diberlakukan</b></p> <p>Di <b>kelas 10</b> pelajar menyiapkan diri untuk <b>menentukan pilihan</b> mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP</p> <p>Di <b>kelas 11 dan 12</b> pelajar mengikuti mata pelajaran dari <b>Kelompok Mapel Wajib</b>, dan memilih mata pelajaran dari Kelompok MIPA, IPS, Bahasa, dan Keterampilan <b>Vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya</b></p> <p>Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila dilakukan <b>3 kali</b> dalam satu tahun ajaran, dan pelajar menulis <b>esai ilmiah</b> sebagai syarat kelulusan</p>	<p>Capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat <b>hanya</b> untuk yang memiliki <b>hambatan intelektual</b></p> <p>Untuk pelajar di SLB yang <b>tidak memiliki hambatan intelektual</b>, capaian pembelajarannya <b>sama</b> dengan sekolah reguler yang sederajat</p> <p>Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan <b>pembelajaran berbasis proyek</b> untuk menguatkan Pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas <b>sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan</b> pelajar di SLB</p>

Sumber: Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak

## Adaptasi Kurikulum Prototipe pada Program Sekolah Penggerak

Sejak 2021, kurikulum prototipe telah diterapkan secara terbatas melalui Program Sekolah Penggerak (PSP). Untuk mempersiapkan satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum prototipe melalui PSP, Kemendikbudristek melakukan beberapa langkah penyiapan. Langkah awal dilakukan lewat pelatihan kepada kepala sekolah, pengawas, dan guru. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan seluruh komponen dari ekosistem satuan pendidikan akan memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep pembelajaran dengan paradigma baru yang menjadi inti dalam kurikulum prototipe untuk kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran. Panduan kurikulum dan contoh perangkat ajar juga disediakan untuk satuan pendidikan pelaksana PSP sebagai bentuk dukungan yang dapat memudahkan mereka dalam menjalani proses adaptasi kurikulum tersebut. Satuan pendidikan juga memperoleh pendampingan dari pelatih ahli sebagai upaya penjaminan mutu layanan pendidikan di sekolah selama beradaptasi dengan kurikulum prototipe ini.

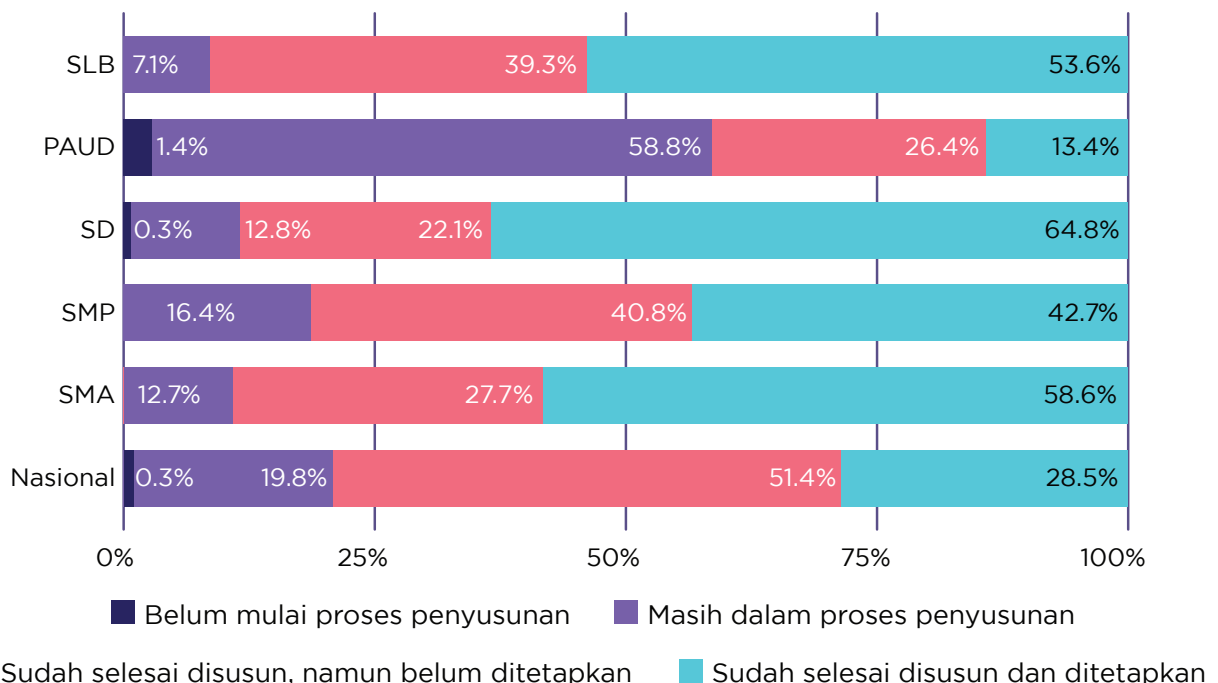
Kemendikbudristek telah melakukan beberapa studi untuk melihat implementasi dan proses adaptasi sekolah terhadap kurikulum prototipe ini. Studi-studi tersebut menunjukkan beberapa temuan berikut.

## Kesimpulan #1: Kurikulum prototipe mendorong satuan pendidikan mengembangkan perencanaan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif.

Gagasan kurikulum prototipe dimulai dengan memberikan keleluasaan kepada guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Untuk itu, satuan pendidikan diberi kesempatan untuk melakukan reformulasi kurikulum berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa melalui penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOS). Dalam menyusun KOS, satuan pendidikan diharapkan mampu melakukan pengumpulan informasi (asesmen) yang terstruktur untuk merumuskan karakteristik satuan pendidikannya. Setelah itu, satuan pendidikan dapat merumuskan kembali visi, misi, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai berdasarkan hasil asesmen karakteristik tersebut. Satuan pendidikan juga dapat menentukan pengorganisasian pembelajaran yang paling tepat dan melakukan pengembangan secara profesional agar guru dapat menyusun rencana pembelajaran di dalam kelas.

Secara umum, KOS terdiri dari lima komponen utama, yaitu: (i) karakteristik satuan pendidikan; (ii) visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan; (iii) pengorganisasian pembelajaran; (iv) pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional; dan (v) rencana pembelajaran. Dalam memberikan layanan pendidikan, satuan pendidikan akan mengacu pada dokumen KOS tersebut. Dokumen ini akan menjadi acuan refleksi sehingga satuan pendidikan dapat menyesuaikan dinamika perubahan dan kebutuhan siswa.

Dalam masa adaptasi di Sekolah Penggerak, sebagian besar (79,92%) satuan pendidikan telah menyelesaikan dokumen KOS, baik yang sudah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan oleh dinas pendidikan (Grafik 1). Sebanyak 19,76% satuan pendidikan masih dalam proses penyusunan KOS, dan sisanya (0,31%) sama sekali belum menyusun KOS. Data tersebut dihasilkan dari studi evaluasi implementasi Program Sekolah Penggerak pada bulan November 2021 dengan responden Kepala Sekolah.



Grafik 1 Status Penyusunan KOS Berdasarkan Jenjang Pendidikan (n= 1.498)

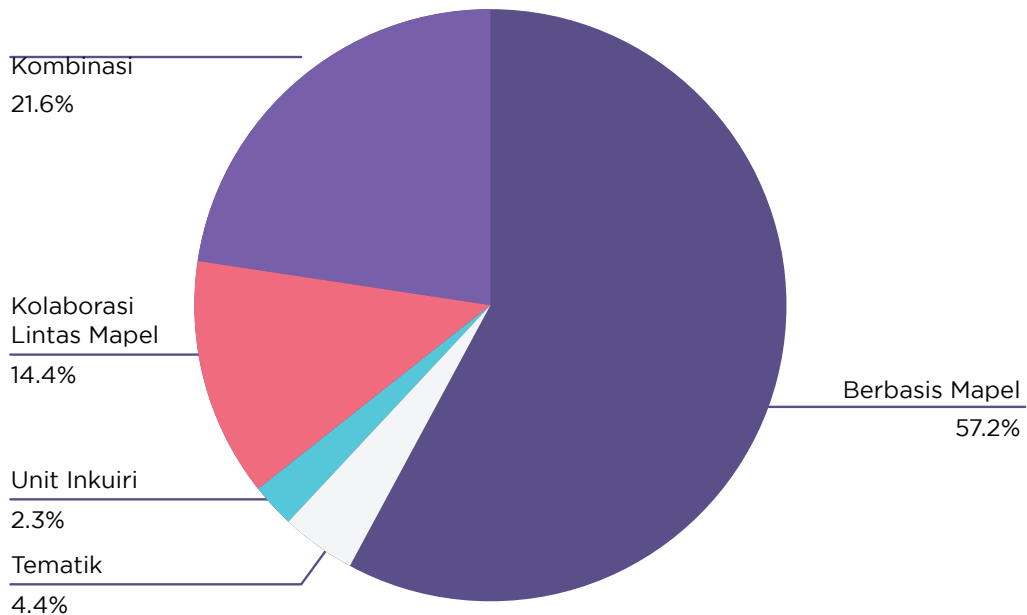
Dalam proses penyusunan KOS, satuan pendidikan melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dinas pendidikan (pengawas), siswa, tokoh masyarakat, dan juga perwakilan organisasi masyarakat. Partisipasi pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi dari berbagai kalangan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Hasil survei menunjukkan, secara umum keterlibatan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan pengawas dalam penyusunan KOS sudah cukup tinggi. Keterlibatan orang tua dalam penyusunan KOS mencapai 57%, sedangkan keterlibatan siswa sekitar 35%.

Proses adaptasi kurikulum berikutnya adalah penyiapan modul ajar oleh guru untuk kegiatan pembelajaran. Sebagian besar guru melakukan proses adaptasi dengan mengadopsi modul dari Kemendikbudristek yang kemudian disesuaikan dengan konteks masing-masing satuan pendidikan. Temuan di lapangan menunjukkan, ada guru yang sudah mulai mencoba berkreasi menyusun modul ajarnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan belajar siswanya, meskipun angkanya belum terlalu tinggi. Hasil survei menunjukkan, 15% guru dari jenjang dasar dan menengah sudah mencoba menyusun modul ajar secara mandiri, sementara pada satuan PAUD dan SLB justru mencapai angka yang lebih tinggi, yaitu sekitar 22% dan 29% guru. Dari hasil wawancara, guru PAUD dan SLB melakukan banyak pengembangan berdasarkan kebutuhan dan masukan dari orang tua siswa. Hasil asesmen karakteristik siswa juga sudah digunakan sebagai pertimbangan guru dalam menyusun modul ajar (telah dilakukan oleh 78% guru).

## **Kesimpulan #2: Kurikulum prototipe mendorong guru melakukan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual.**

Dalam pelaksanaan pembelajaran, umumnya guru sudah mulai menerapkan metode mengajar yang lebih fleksibel. Temuan kami di lapangan menunjukkan, pembelajaran yang dilakukan guru tidak lagi hanya sebatas di dalam kelas, tetapi juga aktivitas di luar ruang kelas. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Reigeluth dan Merrill (dalam Munawaroh, 2017) mengungkapkan bahwa metode guru mengajar yang lebih interaktif dan banyak diisi dengan diskusi yang menyenangkan secara tidak langsung memengaruhi hasil belajar siswa sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna.

Salah satu contoh fleksibilitas juga tampak dalam cara guru mengorganisasikan pembelajaran (Grafik 2). Saat ini, sekolah memiliki cara yang beragam dalam mengorganisasikan pembelajarannya. Temuan di lapangan menunjukkan, sebagian besar upaya mengorganisasikan pembelajaran memang masih berdasarkan mata pelajaran (57,2%). Namun, kolaborasi antarmata pelajaran atau kerja sama lintas mata pelajaran sudah mulai banyak dilakukan (21,6%). Model pembelajaran kombinasi atau menggabungkan beberapa pendekatan pembelajaran juga cukup tinggi, yaitu 21,6% sekolah. Sedangkan metode tematik yaitu pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema-tema berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran hanya dilakukan oleh 4,4% sekolah. Adapun metode unit inkuiri atau metode pembelajaran berbasis riset dan bukti empiris sudah mulai muncul meskipun baru dilakukan oleh 2,3% sekolah. Pada beberapa sekolah, pengorganisasian pembelajaran juga mulai didasarkan pada hasil refleksi guru atas kemampuannya agar materi yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh siswa.



**Grafik 2** Persentase Kepala Sekolah menurut Pendekatan Pengorganisasian Pembelajaran di Sekolah (n = 1.498)

Selain melalui metode yang fleksibel, suasana menyenangkan juga tampak pada penerapan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). P5 merupakan aktivitas pembelajaran melalui kolaborasi berbagai mata pelajaran. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh sebagian besar sekolah, di mana sekolah biasanya memilih tema berdasarkan keinginan siswa dan potensi wilayah di mana sekolah tersebut berada.



**Gambar 1** Suasana Belajar di Luar Kelas di SDNU Al-Mustaniroh, Gresik

## Adaptasi Kurikulum Prototipe di PAUD GPdI Imanuel Manembo-nembo, Kota Bitung, Sulawesi Utara

Di tengah keterbatasan ruang kelas, TK Imanuel Manembo-nembo, Kota Bitung, Sulawesi Utara melakukan adaptasi kurikulum prototipe dengan menyesuaikan kondisi sekolah, konteks lingkungan sekolah, dan budaya setempat. Sekolah banyak menerapkan metode mengajar berbasis projek, melakukan observasi di lingkungan sekitar sekolah, serta memanfaatkan potensi lokal. Fleksibilitas kurikulum memberi keleluasaan guru untuk mengajak siswa belajar di luar ruang kelas dan memperkenalkan daerah sekitarnya. Misalnya, siswa diajak ke pelabuhan dan pinggir sungai untuk lebih mengenal lingkungannya. Siswa juga diajak ke daerah lain di sekitar sekolah untuk mengumpulkan media ajar yang digunakan dalam belajar berhitung sambil bermain. Dalam mengimplementasikan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), satuan PAUD memilih tema membuat abon ikan karena produksi ikan melimpah di kota tersebut. Gagasan tersebut berasal dari diskusi dengan guru dan orang tua. Orang tua senang karena sering dilibatkan dalam berbagai aktivitas di sekolah. Guru juga senantiasa berkoordinasi dengan orang tua untuk berdiskusi terkait perkembangan anak. Dalam pembelajaran di satuan PAUD, orang tua dan anak juga diberi ruang dalam memilih aktivitas yang ingin dilakukan di dalam kelas. Kegiatan ini berdampak positif, salah satunya siswa menjadi semangat datang ke sekolah karena tidak sabar untuk melakukan kegiatan yang menarik di sekolah.

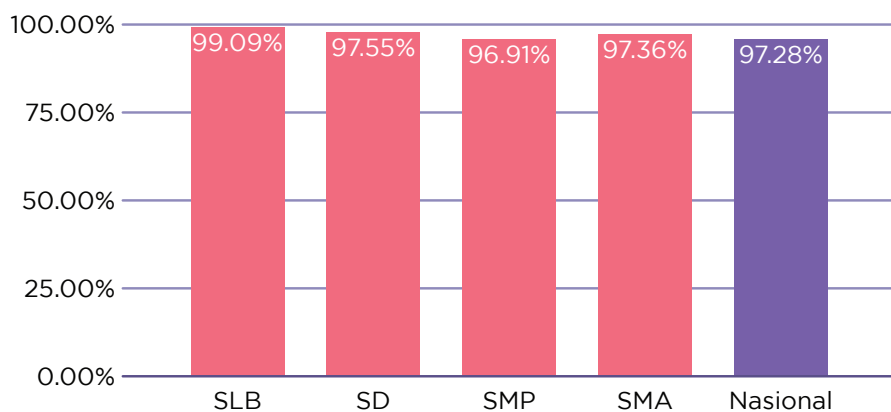


**Gambar 2** Projek Membuat Abon Ikan di PAUD GPdI Imanuel Menembo-nembo, Kota Bitung

### **Kesimpulan #3: Kurikulum prototipe mendorong guru melakukan langkah inisiasi pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar siswa.**

Praktik baik lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum prototipe dapat dilihat dari cara guru memanfaatkan hasil asesmen. Guru menggunakan prinsip *assessment for learning*, yaitu proses penilaian siswa yang digunakan sebagai acuan pembelajaran berikutnya. Dalam kurikulum prototipe, guru diharapkan dapat melakukan asesmen diagnostik atau pra-penilaian pada siswa sebelum melakukan pembelajaran. Asesmen diagnostik akan membantu guru dalam memahami pengetahuan dan keterampilan siswa, sehingga menjadi dasar untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan.





Grafik 3 Persentase Guru yang Melakukan Asesmen Diagnostik (n=7.880)

Dari hasil survei pada guru di Sekolah Penggerak yang dilakukan pada bulan November 2021 terungkap, hampir seluruh guru sudah menggunakan asesmen diagnostik (Grafik 3). Kondisi ini merata di seluruh jenjang baik di kawasan tertinggal maupun nontertinggal. Secara nasional, hanya 2,72% guru yang belum menggunakan asesmen diagnostik untuk pembelajaran. Di Indonesia, asesmen diagnostik belum digunakan guru sebagai acuan merancang pembelajaran, padahal hal ini cukup penting untuk menentukan arah pembelajaran (World Bank, 2021). Pelaksanaan asesmen diagnostik secara masif menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih positif. Guru diharapkan makin memahami kebutuhan belajar siswa. Saat ini, satuan pendidikan Sekolah Penggerak baru beradaptasi untuk menerapkan konsep *assessment for learning* di semester pertama, sehingga hasilnya belum terlihat signifikan. Namun, jika hal ini menjadi budaya baru, maka *assessment for learning* dapat membantu siswa, khususnya pada siswa dengan nilai rendah untuk meningkatkan hasil belajarnya secara signifikan (Cambridge Asesmen for Education, 2021).

## Penerapan Asesmen Diagnostik di SLBN Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat

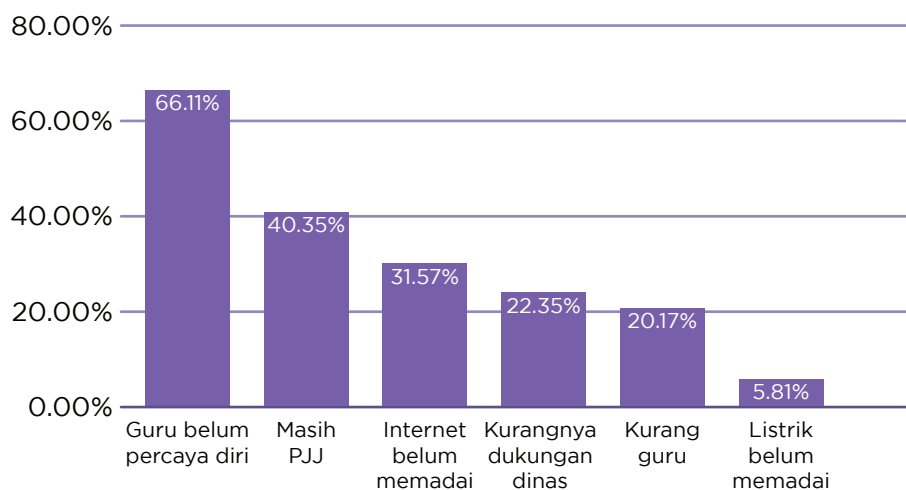
SLBN Cicendo merupakan sekolah luar biasa yang berada di Kota Bandung. Sekolah berupaya menerapkan prinsip pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan siswa secara holistik terutama dalam mempersiapkan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik berdasarkan hambatan yang dimiliki. Proses layanan pendidikan untuk anak di SLB dimulai dari penyelenggaraan asesmen yang komprehensif yang biasanya tidak dilakukan di sekolah umum, yaitu meliputi asesmen perkembangan dan asesmen akademik. Asesmen perkembangan mencakup aspek kognitif, motorik, emosi dan sosial, komunikasi, serta riwayat ketunaan. Asesmen akademik meliputi kemampuan dalam beradaptasi dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, sekolah melakukan tes *Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)* dan audiogram untuk mengetahui ambang batas kemampuan pendengaran anak bekerja sama dengan *Bandung Hearing Aid*. Selain itu, tes psikologi juga dilaksanakan atas kerja sama sekolah dengan lembaga konsultan psikologi. Keragaman siswa direspons dengan pelaksanaan asesmen yang komprehensif agar didapatkan informasi yang utuh, sehingga perancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka lahirlah program pembelajaran individual di mana guru mengembangkan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan, hambatan, potensi, dan kemampuan siswa. Setelah didapatkan informasi yang lengkap tentang kondisi anak, guru merumuskan program dan aplikasi kurikulum yang tepat untuk anak dan menempatkan anak sesuai *mental age* dan kemampuannya.



Gambar 3 Kegiatan Terapi Wicara di SLBN Cicenco

## Kesimpulan 4#: Dibutuhkan Penguatan untuk Mengoptimalkan Implementasi Kurikulum Prototipe

Meskipun adaptasi kurikulum telah mulai tampak menggembirakan, namun berbagai kendala masih dirasakan oleh satuan pendidikan. Kendala yang paling banyak dirasakan menurut persepsi kepala sekolah adalah guru belum percaya diri dalam mengimplementasikan kurikulum prototipe. Dari hasil studi terungkap, sebagian besar guru sudah berupaya melaksanakan implementasi kurikulum, namun masih membutuhkan konfirmasi dari pendamping apakah yang dilakukannya sudah sesuai dengan harapan atau belum. Ketidakpercayaan diri ini juga dipicu oleh kurangnya pemahaman guru terkait konsep kurikulum, misalnya dalam penyusunan dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOS), pelaksanaan P5, dan penyusunan pengorganisasian pembelajaran. Di sisi lain, kondisi pandemi yang mengharuskan sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi kendala dalam mengimplementasikan kurikulum prototipe. Kendala lain yang dihadapi sekolah adalah kurangnya dukungan dari dinas pendidikan selama proses adaptasi kurikulum ini. Dalam konteks ini, dukungan dinas diharapkan dapat memicu ekosistem belajar antarpendidik, mendampingi implementasi kurikulum, maupun fasilitasi sarana dan prasarana di satuan pendidikan.



Grafik 4 Hambatan Implementasi Kurikulum (n=8.232)

## Rekomendasi

Pada tahun ajaran 2021-2022, kurikulum prototipe telah diimplementasikan secara terbatas pada 2.500 satuan pendidikan pelaksana PSP. Studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa selama proses adaptasi kurikulum tersebut telah tampak beberapa perubahan positif dalam pembelajaran, antara lain: a) tumbuhnya perencanaan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif; b) metode pembelajaran yang lebih beragam; dan c) inisiatif praktik pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Namun demikian, berbagai tantangan selama proses adaptasi ini juga masih dijumpai baik karena pemahaman satuan pendidikan yang belum utuh terkait kurikulum prototipe, maupun perlunya peningkatan dukungan dari dinas pendidikan.

Berdasar temuan studi tersebut, risalah kebijakan ini merekomendasikan beberapa hal untuk memperluas implementasi kurikulum prototipe.

### 1. Diperlukan penguatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia bagi satuan pendidikan.

Pada tahap awal adaptasi ini, pendampingan yang terlampau memberikan perhatian pada dokumen kurikulum hendaknya dikurangi. Proses adaptasi kurikulum harus lebih fokus pada proses yang lebih esensial untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Untuk mendukung upaya ini, penting juga untuk mengoptimalkan diseminasi panduan kurikulum prototipe dengan melakukan diversifikasi bentuk (misalnya: video, infografis), media (misalnya: *website*, media sosial, platform guru), maupun strategi (misalnya dengan menunjukkan praktik-praktik baik yang telah dilakukan sekolah) terhadap panduan yang telah ada saat ini.

### 2. Dibutuhkan penguatan keterlibatan pemerintah daerah (dinas pendidikan) agar dapat memberikan dukungan secara optimal.

Dukungan pemerintah daerah agar kurikulum prototipe dapat diimplementasikan oleh satuan pendidikan secara optimal sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas pendampingan kepada satuan pendidikan, misalnya melalui *workshop*, refleksi komunitas praktisi baik di dalam maupun antarsatuan pendidikan atau pendamping ahli yang memfasilitasi proses refleksi agar satuan pendidikan dapat lebih percaya diri. Untuk itu, sosialisasi dan advokasi kepada dinas pendidikan sangat penting supaya mereka dapat memberikan dukungan terhadap adaptasi kurikulum yang dilakukan satuan pendidikan.

## Daftar Pustaka

- Beatty, Amanda; Emilie Berkout; Luhur Bima; Menno Pradhan; Daniel Suryadarma. (2021). Schooling Progress, Learning Reversal: Indonesia's Learning Profiles Between 2000 and 2014. *International Journal of Educational Development* 85 (2021) 102436.
- Cambridge Assessment International Education. (2021). *Getting started with Assessment for Learning*. cambridge-community.org.uk
- Kementerian Keuangan. (2021). Usaha Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Mandatory Spending Anggaran Pendidikan. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/usaha-meningkatkan-kualitas-pendidikan-melalui-mandatory-spending-anggaran-pendidikan>
- Munawaroh. (2017). *The Influence of Teaching Methods and Learning Environment to the Student's Learning Achievement of Craft and Entrepreneurship Subjects at Vocational High School*. *International Journal Of Environmental & Science Education* 2017, Vol. 12, No.4, 665-678 EJ1144859.pdf (ed.gov)
- Muttaqin, Tatang. (2018). Determinant of Unequal Access to and Quality of Education in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan* 2 (1) Maret 2018. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.27>
- OECD. (2020). *OECD Education Working Papers No. 239. Curriculum Reform: A Literature Review to Support Effective Implementation*. Paris: OECD Publishing.
- Pritchett, Lant dan Beatty, Amanda. (2012). *The Negative Consequences of Overambitious Curricula in Developing Countries*. Working Paper 293 April 2012. Center for Global Development.
- Puslitjak dan INOVASI. *Pemulihan Pembelajaran: Waktunya untuk Bertindak*. Risalah Kebijakan-Agustus 2021.
- The SMERU Research Institute-The RISE Programme in Indonesia. (2020). Memulihkan Penurunan Kemampuan Siswa Saat Sekolah di Indonesia Dibuka Kembali. [https://rise.smeru.or.id/sites/default/files/event/Flo-rischa%20Ayu%20Tresnatri\\_Memulihkan%20Penurunan%20Kemampuan%20Siswa%20Saat%20Sekolah%20di%20Indonesia%20Dibuka%20Kembali.pdf](https://rise.smeru.or.id/sites/default/files/event/Flo-rischa%20Ayu%20Tresnatri_Memulihkan%20Penurunan%20Kemampuan%20Siswa%20Saat%20Sekolah%20di%20Indonesia%20Dibuka%20Kembali.pdf)
- World Bank. (2021). *Student Learning and Diagnostic Assessment Tools for Remote Primary Schools in Indonesia's Lagging Districts*. *Student Learning and Diagnostic Assessment Tools for Remote Primary Schools in Indonesia Lagging Districts*. (worldbank.org)



**Risalah Kebijakan** ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh **Pusat Penelitian Kebijakan**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: **Pusat Penelitian Kebijakan**

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-5736365, 5713827

**Tim Penyusun**

Indah Pratiwi  
Ika Hijriani  
Bakti Utama  
Joko Purnama  
Irsyad Zamjani